

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi iklim global telah mengganggu pertumbuhan harga pangan sehingga terjadi potensi kenaikan harga pada beberapa komoditas. Perubahan iklim dan kemarau panjang yang banyak terjadi di negara penghasil komoditas pertanian menjadikan beberapa lembaga Internasional memberikan peringatan dini tentang adanya fluktuasi harga pangan. Hal tersebut harus disikapi dengan bijak, salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan. Jika sudah ada peringatan seperti itu, maka semua dituntut benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan baik demi meningkatkan ketahanan pangan.¹

Isu mengenai ketahanan pangan merupakan isu yang sangat sensitif, dimana dari isu tersebut dapat mempengaruhi hubungan antar Negara khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Keadaan seperti ini dapat dipicu diantaranya dengan kondisi alam yang dapat setiap waktu mengalami perubahan iklim global baik itu ekstrim maupun tidak. Tidak hanya kondisi perubahan iklim saja yang dapat berpengaruh terhadap hubungan antar Negara, namun dengan adanya laju pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat di setiap tahunnya yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan pangan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara produktifitas pangan dengan jumlah kebutuhan atau permintaan yang terus meningkat.

Secara global, produksi pangan dunia memang terus mengalami surplus dan peningkatan

¹ http://www.kompasiana.com/sae/krisis-pangan-dan-ancaman-asean-economic-community-2015_552a4927f17e612f70d62502
Diakses pada 5 Agustus 2015

produksi, namun bukan berarti dunia absen dari bencana kelaparan dan malnutrisi. Krisis pangan terjadi karena imbas dari konflik politik yang menjadi masalah internal dalam masing-masing negara. Krisis pangan yang dialami tiap-tiap Negara terjadi bukan hanya karena konflik politik, melainkan karena bencana alam serta kondisi geografis yang tidak mendukung sehingga menjadikan masyarakatnya mengalami keterbatasan dalam menciptakan ketersediaan pangan secara mandiri.

Dalam konteks lingkup regional ASEAN, dari beberapa Negara-negara anggotanya sebagian besar masyarakatnya mengkonsumsi jenis makanan pokok yaitu berupa beras. Di ASEAN sendiri terdapat beberapa Negara yang terkenal sebagai produsen utama penghasil beras, diantaranya seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Dalam kondisi lingkungan alam yang stabil, kemampuan setiap Negara dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik cenderung mengalami surplus sehingga arus perdagangan bahan pangan antar Negara akan lancar. Negara-negara pemasok utama bahan pokok seperti Thailand dan Vietnam yang sering dilanda bencana alam berupa banjir, akan memberikan dampak pada penurunan produktifitas bahan pangan. Maka dari itu, Negara-negara pemasok bahan pokok tersebut akan lebih mengutamakan kebutuhan pokok dalam negeri. Kebijakan seperti itu akan menghambat kelancaran arus perdagangan bahan pangan antar Negara, sehingga akan menimbulkan ketegangan hubungan antar negara regional ASEAN.

Agar ketegangan antar negara ASEAN tidak terjadi, yang disebabkan oleh terhambatnya arus lalu lintas bahan pangan, maka setiap pemimpin negara anggota ASEAN dirasa perlu mengadakan pertemuan guna membahas serta menemukan solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup di kawasan ASEAN. Sebagai upaya bersama yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan regional ASEAN, maka dibentuklah *ASEAN*

INTEGRATED FOOD SECURITY (AIFS) sebagai kerangka kerjasama negara-negara ASEAN dalam mewujudkan ketahanan pangan regional yang saat ini menjadi salah satu persoalan serta tantangan serius yang perlu dipecahkan untuk menemukan solusi bersama ditengah krisis pangan sebagai dampak terjadinya perubahan iklim global.

Diantara negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia dikenal sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang memiliki cakupan wilayah yang paling luas dibandingkan dengan negara anggota lain. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memanjang dari Aceh hingga Papua. Dewasa ini dengan penduduk sebanyak 216 juta mungkin Indonesia tetap akan menjadi negara terbesar dibanding negara-negara anggota lain baik negara pendiri maupun negara-negara anggota baru sebagai hasil dari perluasan ASEAN.² Sekalipun penduduknya berjumlah banyak Indonesia memiliki perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama di kalangan penduduknya.

Di Indonesia laju pertumbuhan penduduk terus meningkat dan belum diimbangi dengan kapasitas produksi pangan dalam negeri, sehingga memicu pemerintah untuk mencari jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selama ini pemerintah mengambil langkah mengimpor kebutuhan pangan dari luar negeri sebagai strategi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menstabilkan harga pangan di pasar. Optimalisasi sumber daya lokal yang menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri perlu ditingkatkan lebih kuat lagi oleh pemerintah dan pihak terkait selain juga untuk mengurangi ketergantungan impor pangan yang terus mengurangi cadangan devisa Indonesia.

Konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang sangat dominan dengan beras merupakan

² Anthony L. Smith, "Indonesia: Transforming the Leviathan," dalam John Funston (ed), *Government and Politics in Southeast Asia*, Singapura : ISEAS, 2001, hal.81.

pemicu masalah dari berbagai aspek yang akan timbul di kemudian hari yakni menurunnya harga jual jenis pangan yang lain, masalah kesehatan dan lain-lain. Selain itu lahan untuk menanam padi semakin berkurang seiring dengan era pembangunan saat ini. Kebutuhan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia perlu diubah dengan cara mengenalkan dan menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi selain beras seperti jagung, umbi-umbian, singkong dan biji-bijian. Pemanfaatan keanekaragaman jenis pangan di Indonesia dapat dijadikan solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras selain itu juga untuk memperbaiki gizi masyarakat dan dapat menjadi jembatan menuju kemandirian pangan nasional.³

Bagi Indonesia, masalah ketahanan pangan sangatlah krusial. Pangan merupakan *basic human need* yang tidak ada substitusinya. Indonesia memandang kebijakan pertanian baik di tingkat nasional, regional dan global perlu ditata ulang. Persoalan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian harus kembali menjadi fokus dari arus utama pembangunan nasional dan global. Oleh karena itu di tengah diplomasi Internasional yang semakin menganggap penting isu ketahanan pangan sebagai agenda sentral, Indonesia mengambil peran aktif dalam menggalang upaya bersama mewujudkan ketahanan pangan domestik dan regional.

Upaya mengutamakan dimensi pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ke dalam agenda pembangunan global juga masih diperjuangkan dalam perundingan putaran Doha (*Doha Development Agenda*) di WTO. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara aktif mengedepankan isu *food security*, *rural development* dan *livelihood security* sebagai bagian dari hak negara berkembang untuk melindungi petani

³ <http://www.drn.go.id/index.php/en/8-berita-terkini/276-diversifikasi-pangan-jurus-jitu-menuju-kemandirian-pangan-perbaikan-gizi-masyarakat-indonesi>. Diakses pada 5 Juli 2015

kecil dari dampak negatif masuknya produk-produk pertanian murah dan bersubsidi dari negara maju, melalui mekanisme *special products* dan *special safeguard mechanism*.⁴

Kerawanan pangan masih meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali sebagian besar di Jawa dan Sumatera. Menurut *World Food Programme (WFP)* tahun 2009, wilayah yang masih timpang antara jumlah produksi bahan pangan pokok terhadap jumlah konsumsi terjadi pada sebagian besar wilayah Papua, Papua Barat, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Kalimantan dan Sumatera serta bagian yang sangat kecil di pulau Jawa. Kerentanan pangan ini disebabkan berbagai faktor, bukan hanya ketersediaan tetapi juga daya beli masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut seakan tidak percaya, sebagai negara agraris yang mengandalkan pertanian sebagai tumpuan kehidupan bagi sebagian besar penduduknya tetapi mengimpor pangan yang cukup besar. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembangunan dan menjadi tantangan yang lebih besar dalam mewujudkan kemandirian pangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan langkah kerja yang serius untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Meskipun mengalami kemajuan yang patut dicatat prestasinya, pembangunan Indonesia masih belum mencukupi. Ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi belum terlaksana dengan baik sehingga masih sangat perlu ditingkatkan dan masih tetap menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah, khususnya untuk provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur di mana indikator-indikator pembangunan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menurut *World Food Program (2013)* sebanyak 13% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 31 juta orang, masih hidup di bawah garis kemiskinan

⁴ <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=9&l=id> Diakses Pada 8 Agustus 2015

nasional. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, hal ini ditengarai sebagai ancaman utama terhadap ketahanan pangan. Indonesia terus berlanjut menghadapi dampak bencana yang besar seperti gempa, tsunami dan erupsi gunung berapi. Untuk itu perlunya antisipasi jika terjadi bencana, kekeringan, banjir dan longsor sehingga dampaknya tidak menghambat ketahanan pangan nasional.

Sebuah negara dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila memenuhi parameter ketahanan pangan yang ada. Parameter ketahanan pangan tersebut dapat dilihat melalui *Global Food Security Index* (GFSI) yang merupakan salah satu media ukur ketahanan pangan yang dibangun oleh DuPont bersama dengan *The Economist Intelligence Unit* pada tahun 2012 untuk memahami ketahanan pangan secara global. Selain GFSI, terdapat beberapa media ukur yang dibangun oleh institusi/lembaga lainnya seperti GHI (*Global Hunger Index*), RBI (*Rice Bowl Index*), FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*), dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, GFSI menekankan indeks ketahanan pangannya pada tiga variabel utama yaitu *Affordability*, *Availability*, serta *Quality and Safety*. Indikator *Affordability/ entitlement* (keterjangkauan) mencakup aspek biaya pengeluaran konsumsi pangan, kondisi sosial ekonomi, tarif impor. *Availability* (ketersediaan) mencakup aspek infrastruktur pertanian, produksi pangan, pengolahan, dsb. Sedangkan *Quality and Safety/Utilization* (kualitas dan keamanan) mencakup aspek kecukupan gizi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi, dsb. Disamping itu terdapat pula indikator lainnya dalam GFSI seperti tingkat korupsi, kualitas kelembagaan pemerintah, serta penelitian dan pengembangan pangan.⁵

⁵ <http://bkp.pertanian.go.id/berita-288-global-food-security-index-2014.html> Diakses Pada 28 Agustus 2015

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi umum masalah ketahanan pangan regional ASEAN
2. Mendeskripsikan mengenai kondisi umum ketahanan pangan serta strategi dalam menciptakan kemandirian pangan Indonesia.
3. Menjelaskan kerangka kerja sama dibentuknya AIFS SPA-FS dalam menangani masalah pangan regional
4. Mencoba mengaplikasikan baik teori maupun konsep guna membahas mengenai strategi yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan domestik dengan mengaplikasikan kerangka kerja sama AIFS SPA-FS

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana langkah Indonesia dalam mengadopsi Kerangka Kerjasama AIFS (*ASEAN Integrated Food Security*) sebagai suatu rezim ketahanan pangan regional ASEAN, untuk meningkatkan ketahanan pangan domestik tahun 2015-2020?”

D. Kerangka Pemikiran :

1. Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan dapat digambarkan dengan keadaan dimana pangan tersedia serta dapat mencukupi kebutuhan bagi setiap individu ataupun masyarakat kapan saja dan dimana saja. Namun, seiring dengan perkembangan jaman sesuai dengan kondisi dan situasi yang terus berkembang, pemahaman mengenai kebutuhan pangan menjadi sangat bervariasi. Maka sejak istilah ketahanan pangan mulai diperkenalkan, pengertian ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang ada. Istilah ketahanan pangan yang dijadikan sebuah kebijakan ini pertama kali dikenal pada waktu

diadakannya *World Food Summit* pada tahun 1974.

Seiring berjalannya waktu, definisi mengenai ketahanan pangan serta berbagai hal yang berkaitan dengan pangan semakin berkembang. Salah satu diantaranya, Maxwell mencoba untuk menelusuri perubahan-perubahan dari definisi mengenai ketahanan pangan sejak berlangsungnya *World Food Summit* pada tahun 1974 hingga pertengahan dekade 1990-an. Menurut *Maxwell*, perubahan yang terjadi dalam penjelasan tentang definisi ketahanan pangan, dapat terjadi pada level global, nasional, pada skala rumah tangga, dan bahkan level individu.

Ada tiga aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan.

- i. *Food availability*, ialah ketersediaan makanan secara fisik yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan makanan pada manusia.
- ii. *Food entitlement*, merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk dikonsumsi.
- iii. *Food utilization*, adalah penggunaan secara tepat dari makanan yang didapatkan oleh setiap orang. Hal ini berkaitan dengan gizi yang terkandung di dalam makanan.⁶

Secara formal, setidaknya ada lima organisasi Internasional yang memberikan definisi mengenai ketahanan pangan. Definisi tersebut dianggap saling melengkapi satu sama lain, diantaranya:⁷

- a. *First World Food Conference 1974, United Nations, 1975*

⁶ FAO (*Food and Agriculture Organization*) <http://www.fao.org/about/en/> accessed on 3 September 2014

⁷ Petik Dua, "Analisis Teori dan Konsep Ketahanan Pangan dan Keterkaitannya terhadap Krisis Pangan Global dalam Ilmu Hubungan Internasional", diakses dari <https://petikdua.wordpress.com/2011/08/23/analisis-teori-dan-konsep-ketahanan-pangan-dan-keterkaitannya-terhadap-krisis-pangan-global-dalam-ilmu-hubungan-internasional/>, pada tanggal 1 Januari 2015 pukul 14.25

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga.

b. FAO (*Food and Agricultural Organization*), 1992

Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif.

c. Bank Dunia (*World Bank*), 1996

Ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif.

d. OXFAM, 2001

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang sehat dan aktif. Ada dua kandungan makna yang tercantum disini, yakni ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas, dan akses dalam artian hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran, maupun klaim.

e. FIVIMS (*Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Systems*), 2005

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi, memiliki akses atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi, untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan pilihan pangan demi kehidupan yang aktif dan sehat.

Konsep ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanan pangan. Kerawanan

pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu sistem kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala kerawanan pangan di sekitarnya serta dapat meresponnya dengan cepat dan efektif. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarkan masyarakat tersebut dari kerawanan yang lebih parah, dengan segala dampak yang mengikutinya.

Sejalan dengan dinamika pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan yang dimiliki pada masyarakat masing-masing wilayah. Keunggulan dari pendekatan ini antara lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan sumberdaya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan lokal tersebut maka ketahanan pangan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejolak pasokan pangan yang terjadi di luar wilayah atau luar negeri.

Pada dasarnya konsep ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan, utamanya bagi golongan rawan pangan sementara maupun rawan pangan kronis yang masih mempunyai potensi pengembangan aktivitas ekonominya. Agribisnis pangan melibatkan banyak pelaku, usaha kecil seperti petani, pengolah dan pedagang yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif sumberdaya lokal.⁸

⁸ http://www.kompasiana.com/www.aepsaefullah.blogspot.com/indonesia-butuh-strategi-revolusioner-untuk-ketahanan-pangan_5508f85e813311791cb1e34d Diakses 7 Agustus 2015

Ketahanan pangan sesungguhnya sangat erat kaitannya dan berpengaruh besar terhadap sektor produksi suatu negara, yang kemudian berpengaruh pada devisa suatu negara, yang akan dimanfaatkan dalam sektor ekspornya, dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, ketahanan pangan pun sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik suatu negara, tentang persetujuan kerja sama antar aktor dalam sektor pangan, kebijakan-kebijakan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam suatu sistem. Berdasarkan pemahaman tersebut, ketahanan pangan menjadi salah satu wacana yang cukup berpengaruh dalam bidang ekonomi politik.

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan domestik, pemerintah telah merumuskan beberapa program yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi. Arah kebijakan peningkatan kedaulatan pangan dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi:⁹

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan petani.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat serta didukung dengan kapasitas kelembagaan keuangan, Indonesia memiliki potensi yang positif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini membutuhkan program yang lebih fokus

⁹ home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp276257.pdf Diakses Pada 14 Agustus 2015

pada pengurangan kemiskinan dan program bermuatan gizi serta diversifikasi makanan.

2. Teori Rezim

Dalam sistem Internasional, Organisasi antar pemerintah atau *Intergovernmental Organizations (IGOs)* mempunyai kontribusi untuk mengatur kerjasama. Secara umum fungsi Organisasi Internasional dalam dunia Internasional menurut *Karent Mingst* adalah mempunyai kontribusi untuk mengatur kerjasama dalam membantu menyelesaikan perselisihan, memfasilitasi pembentukan jaringan antar pemerintah dan antar bangsa, sebagai arena perundingan Internasional, sebagai tempat penciptaan rezim Internasional.

Menurut *Stephen D. Krasner* yang dimaksud rezim adalah “principle, norms, rules, and decision-making procedures around which actor’s expectation converge in a given issue area”.¹⁰

Artinya suatu tatanan yang berisikan kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional. Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antar negara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal. Rezim sendiri dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum Internasional. Lebih jauh lagi rezim dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya.

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar negara dan merupakan aktor independen dalam politik Internasional. Rezim ketika dilembagakan

¹⁰ Karen Mingst, “*Essentials Of International Relations*”, W.W Norton & Company, New York, 1998, hal. 259.

akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. Rezim yang baik merupakan rezim yang efektif, dalam konteks ini AIFS sebagai suatu rezim harus mampu mencapai poin-poin penting sesuai kerangka kerjasama ketahanan pangan di ASEAN di mana kerangka kerjasama yang sudah ada dalam AIFS tersebut dapat diadopsi oleh negara-negara anggota untuk mencapai kemakmuran peningkatan pangan kedepannya.

Peningkatan ketahanan pangan tidak terlepas dari faktor cuaca maupun iklim, sehingga perannya dapat memberikan dampak dengan adanya perubahan iklim global dengan berbagai macam bentuk bencana seperti, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta bencana alam lainnya yang sangat berpengaruh pada kapasitas produksi pangan di Negara-negara ASEAN. Dampak yang sangat terlihat yaitu, menurunnya pasokan bahan pokok seperti beras yang pasokannya akan menurun. Kondisi tersebut sangat berpengaruh besar terhadap pendistribusian bahan pokok pangan, karena dapat mengganggu permintaan di tingkat regional ASEAN. Keadaan seperti ini lah yang dapat memicu timbulnya konflik regional ASEAN. Hingga pada akhirnya pemimpin ASEAN bersepakat membentuk kerangka kerjasama AIFS (*ASEAN Integrated Food Security*) sebagai forum bersama di tingkat regional ASEAN yang memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ketahanan pangan serta melakukan upaya bersama dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya dampak dari terjadinya perubahan iklim global.

Sebagai sebuah rezim, AIFS memiliki sebuah kerangka kerjasama yang di dalamnya terdapat 4 komponen dengan masing-masing strategi utama yang saling terkait diantaranya

.¹¹

¹¹ Majalah ASEAN Edisi 3 “ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 23 dan KTT Terkait lainnya” By Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI

1. Darurat pangan atau tanggap terhadap kekurangan pangan dengan strategi utama penguatan pengaturan ketahanan pangan.
2. Pertumbuhan perdagangan pangan yang berkelanjutan dengan strategi utama meningkatkan perdagangan dan pasar pangan yang kondusif.
3. Sistem informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dengan strategi utama memperkuat sistem informasi yang terintegrasi untuk dapat memprediksi, merencanakan dan memonitor pasokan pemanfaatan komoditas pangan secara efektif.
4. Inovasi pertanian dengan strategi utama meningkatkan produksi pangan berkelanjutan, mendorong investasi di sektor industri berbasis pangan dan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, identifikasi dan membahas isu terkait ketahanan pangan.

Sebagai suatu rezim ketahanan pangan regional di ASEAN, AIFS dibentuk karena adanya masalah pangan negara-negara anggota ASEAN dimana diketahui masalah pangan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dan dapat mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga para pemimpin negara bersepakat membentuk suatu kerjasama regional *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) tersebut. Dimana di dalam AIFS tersebut berisi mengenai beberapa kerangka kerja sama yang dibentuk oleh negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama yaitu mengenai masalah pangan. Sebagai suatu rezim, AIFS membentuk suatu kerangka kerja sama yaitu SPA-FS atau (*Framework Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security*) yaitu rencana aksi ketahanan pangan. Rezim AIFS tersebut merupakan suatu organisasi antar pemerintah atau *Intergovernmental Organizations* (IGOs) yang memiliki fungsi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada antar pemerintah maupun antar bangsa.

AIFS sebagai suatu rezim ketahanan pangan ini tentu memiliki prinsip, norma, aturan maupun proses di dalamnya yang mengatur mekanisme terlaksananya kerangka kerja yang telah disepakati tersebut oleh negara-negara yang terlibat dalam pembuatannya. Rezim ketahanan pangan atau AIFS ini bertindak sebagai suatu sarana dalam penyelesaian masalah pangan yang ada di negara-negara ASEAN sehingga memunculkan aturan mengenai ketaatan negara anggota atas kepentingan apa yang mereka miliki hingga terbentuknya suatu rezim ketahanan pangan regional ASEAN ini.

E. Hipotesa

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan hipotesa mengenai Strategi Indonesia dalam mengadopsi kerangka kerja sama AIFS SPA-FS untuk meningkatkan ketahanan pangan tahun 2015-2020, Indonesia mengambil langkah domestik untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan 3 cara diantaranya dari segi ketersediaan pangan (*availability*), akses pangan (*entitlement*), dan penggunaan makanan (*utilization*) yang berkaitan dengan gizi yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya dengan cara domestik saja Indonesia mengambil langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan domestik, namun Indonesia juga mengadopsi strategi eksternal melalui 4 poin kerangka kerjasama AIFS sebagai langkah kedua setelah langkah domestik dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini memiliki batasan waktu, yakni menuju penciptaan kemandirian pangan Indonesia tahun 2015 hingga 2020.

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu masalah atau fenomena yang menjadi topik kajian utama berdasarkan temuan data lapangan dan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dengan memprioritaskan keluasan topik melalui aspek analisa data.¹²

Untuk dapat menyelesaikan serta menganalisa permasalahan yang ada, penulis melakukan studi literatur yang relevan dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yakni buku, majalah, surat kabar, dan data elektronik (internet) yang diantaranya berbentuk jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

¹² Nursalam, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang diantaranya terdiri dari lima bab pembahasan, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-pokok bahasan di dalamnya.

BAB I : Bab satu berisi tentang pendahuluan. Bab ini memuat serta menguraikan diantaranya latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab dua berisi mengenai gambaran umum sejarah berdirinya, visi, misi, kerangka kerjasama dan program-program ASEAN Integrated Food Security (AIFS) 2009-2013, kerangka pendukung AIFS: Strategic Plan and Action on Food Security (SPA-FS) 2009-2013.

BAB III : Bab tiga akan membahas mengenai permasalahan umum kondisi pangan di Indonesia.

BAB IV : Membahas mengenai strategi yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan tahun 2015-2020 melalui mekanisme kerangka kerja AIFS (*ASEAN Integrated Food Security*)

BAB V : Berisi Penutup, yang berisi tentang kesimpulan atas jawaban pokok pada penelitian mengenai “Aplikasi Kerjasama AIFS (*ASEAN Integrated Food Security*) dan SPA-FS (*Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security*) Tahun 2009-2013 Oleh Indonesia Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Domestik 2015-2020”

